



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Perwakilan No. 1 Wates Kulon Progo

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2017-2022**



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 dapat diselesaikan dengan baik. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 dengan tujuan "Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif", maka sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Kulon Progo disusun RENSTRA Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022.

Renstra dimaksud disusun dengan memuat tujuan, sasaran dan program Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016. Selanjutnya untuk mencapai tujuan, sasaran dan program tersebut diharapkan masing-masing komponen dapat menyelaraskan potensi peluang dan kendala yang dihadapi dengan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan penjabaran APBD Kabupaten Kulon Progo setiap tahunnya. Disamping itu juga dapat dipergunakan untuk pengukuran penilaian dan evaluasi kinerja serta sebagai dasar tolak ukur Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Sangat disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan RENSTRA tidak terlepas dari pengaruh keadaan dan peran berbagai pihak. Oleh karena itu, dukungan dan kerjasama dari seluruh pihak yang berkepentingan sangat diharapkan. Dengan demikian BKAD Kulon Progo akan dapat memberikan kontribusi kepada pembangunan Kabupaten Kulon Progo pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya, sesuai dengan peran, tugas dan fungsi yang diemban.

Wates, 20 Desember 2017

Sd Kepala



Drs. RUDIYATNO, MM
NIP. 19630720-199303 1 005

DAFTAR ISI

HALAMAN MUKA

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB. II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	8
2.2 Sumber Daya SKPD.....	15
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD.....	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.....	33
BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	25
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan SKPD.....	35
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	36
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	39
3.4 Penentuan isu-isu strategis.....	32
BAB.IV TUJUAN DAN SASARAN	44
4.1 Tujuandan Sasaran Jangka menengah Perangkat Daerah.....	44
BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	46
BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	48
BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	62
BAB VIII PENUTUP.....	65

Lampiran :

1. Data Indikator Kinerja Utama
2. Data Indikator Kinerja Program

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 Pegawai menurut Golongan/Ruang
2. Tabel 2.2 Pegawai menurut latar belakang pendidikan formal
3. Tabel 2.3 Pegawai menurut Eselon
4. Tabel 2.4 Pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti
5. Tabel 2.5 Jumlah pegawai yang ada di BKAD
6. Tabel 2.6 Jumlah asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)
7. Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan BKAD tahun 2016
8. Tabel 2.8 Capaian kinerja tahun sebelumnya
9. Tabel 2.0 Anggaran dan realisasi belanja BKAD tahun 2012-2016
10. Tabel 3.1 Faktor penghambat dan pendorong SKPD terhadap pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
11. Tabel 3.2 Permasalahan pelayanan BKAD berdasarkan sasaran Kementerian Keuangan
12. Tabel 3.3 Permasalahan pelayanan BKAD berdasarkan sasaran Renstra DPPKA DIY
13. Tabel 3.4 Identifikasi Isu-isu strategis
14. Tabel 4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan BKAD
15. Tabel 4.2 Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan
16. Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif BKAD
17. Tabel 6.1 Rancangan program kegiatan, indikator kinerja sasaran dan pendanaan indikatif BKAD
18. Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama SKPD
19. Tabel 7.2 Indikator Kinerja Program SKPD

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis, desentralistik dan berorientasi pada transparansi dan pemberdayaan masyarakat diperlukan adanya Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai tolok ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Penyusunan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo merupakan tolok ukur Badan dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu lima tahun kedepan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Adapun penyusunan Renstra BKAD Tahun 2017-2022 ini mengacu pada RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan BKAD, sehingga dapat tercapai tujuan dan sasaran yang sama dengan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan kedalam program tahunan yang disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJAPD) yang berisikan tentang sasaran, kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dan partisipasi rakyat.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah diharuskan menyusun RENSTRA yang berisikan tentang gambaran umum, tugas pokok dan

Renstra BKAD 2017-2022

fungsi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah maka pemerintah daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai rencana lima tahunan dan RKPD sebagai rencana tahunan. Sehubungan dengan hal tersebut, guna memenuhi semua ketentuan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional maupun daerah maka perlu disusun rangkaian dokumen perencanaan pembangunan sebagai berikut:

1. RPJP Daerah, berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD pada setiap 5 tahun sekali.
2. RPJM daerah berfungsi sebagai penjabaran dari RPJP Daerah yang memuat visi, misi, gambaran umum kondisi masa kini, gambaran umum kondisi yang diharapkan, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan, strategi serta indikator rencana program lima tahunan.
3. Renstra OPD, berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJMD bagi unit kerja perangkat daerah yang memuat tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD untuk jangka waktu lima tahun.
4. RKPD, Berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan atas Renja OPD setiap tahun anggaran yang merupakan bahan utama musrenbang RKPD.
5. Renja OPD, sebagai dokumen perencanaan tahunan pada setiap unit kerja perangkat daerah yang merupakan rencana operasional

Renstra BKAD 2017-2022

dari Renstra OPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta pembiayaan yang masih bersifat indikatif.

Atas dasar hal tersebut diatas, ada tiga (3) alasan mengapa perencanaan strategis itu penting bagi organisasi yaitu:

1. Perencanaan strategis memberikan kerangka dasar dalam semua bentuk perencanaan lainnya yang harus diambil;
2. Pemahaman tentang perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk perencanaan lainnya;
3. Perencanaan strategis merupakan titik awal dalam pemahaman dan penilaian berbagai kegiatan pimpinan dalam organisasi.

Dalam rangka menjamin adanya konsistensi dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi, penyusunan rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo.

Renstra BKAD disusun juga mempertimbangkan keselarasan dengan Renstra Kementerian Keuangan dan DPPKA DIY.

Proses penyusunan Renstra melalui beberapa tahap, yang pertama penilaian kinerja organisasi, kemudian menganalisis isu-isu strategis, dalam hal ini kami mencoba memetakan beragam isu strategis yang terkait dengan organisasi untuk jangka waktu lima tahun mendatang dan tahap berikutnya adalah perumusan Renstra. Renstra ini disusun secara partisipatif yang melibatkan tim dan narasumber dari DPPKA DIY untuk diskusi agar Renstra yang disusun sesuai yang diharapkan.

Menjadi sebuah tuntutan utama pada sebuah organisasi untuk memiliki tujuan dan arah dari pendirian organisasi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal dan tujuan akhir periode waktu tertentu suatu kondisi yang sangat diharapkan. Dengan mengilhami hal

tersebut, maka pada setiap organisasi publik harus memiliki visi dan tujuan serta upaya pencapaian tujuannya agar hal yang diharapkan dapat terwujud.

Renstra merupakan kontribusi bagi BKAD untuk aktif dalam pelaksanaan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Renstra BKAD tahun 2017-2022 adalah :

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaianya;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017– 2022;
18. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 tentang uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Badan Keuangan dan Aset Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra BKAD Tahun 2017-2022 adalah :

1. Sebagai perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel.
2. Menjabarkan program sebagaimana diamanatkan RPJMD ke dalam kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BKAD dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Renstra BKAD 2017-2022

3. Merupakan titik awal guna melakukan pengukuran kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai institusi.
4. Sebagai salah satu media pertanggungjawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Sedangkan tujuan dalam penyusunan Renstra BKAD Tahun 2017-2022 adalah :

1. Tersedianya dokumen dan acuan resmi bagi organisasi BKAD dalam rangka menyusun program kegiatan prioritas yang akan terdani dalam APBD;
2. Terjabarnya gambaran umum BKAD pada kondisi saat ini dan kondisi yang ingin dicapai pada rentan waktu lima tahun kedepan sekaligus tujuan yang ingin di capai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi Pemerintahan daerah;
3. Sebagai media untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun ke depan;

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra BKAD Tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I : PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum;
 - 1.3 Maksud dan Tujuan;
 - 1.4 Sistematika Penyusunan.

Renstra BKAD 2017-2022

- Bab II : GAMBARAN PELAYANAN BKAD
 - 2.1 Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi BKAD;
 - 2.2 Sumber DayaBKAD;
 - 2.3 Kinerja Pelayanan BKAD;
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan pelayananBKAD.
- Bab III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKAD;
 - 3.2 Telaahan Visi dan Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih;
 - 3.3 Telaahan Renstra K/L ;
 - 3.4 Penentuan isu-isu strategis.
- Bab IV : TUJUAN DAN SASARAN
 - 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- Bab. V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- Bab VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- Bab VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.
- Bab VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas, Fungsi

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk membentuk Perangkat daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan diatas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah membentuk Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, disebutkan bahwa "Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang keuangan dan asset daerah". Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut BKAD Kabupaten Kulon Progo mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan kegiatan di Bidang Pajak;
- b. Menyelenggarakan kegiatan di Bidang Pendapatan;
- c. Menyelenggarakan kegiatan di Bidang Anggaran dan Kebijakan Pengelolaan Anggaran;
- d. Menyelenggarakan kegiatan di Bidang Perbendaharaan;

- e. Menyelenggarakan kegiatan di Bidang Aset;
- f. Menyelenggarakan kegiatan di Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
- g. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

2.1.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah, susunan organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Perencanaan
 - 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Pajak terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
 - 2. Sub Bidang Penetapan; dan
 - 3. Sub Bidang Penagihan dan Pengawasan.
- d. Bidang Pendapatan terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan;
 - 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan; dan
 - 3. Sub Bidang Perimbangan Pendapatan.
- e. Bidang Anggaran dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
 - 2. Sub Bidang Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - 3. Sub Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan.
- f. Bidang Perbendaharaan terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Belanja; dan

2. Sub Bidang Pengelolaan Kas.

- g. Bidang Asset, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Inventarisasi dan Penilaian;
 - 2. Sub Bidang Penghapusan dan Administrasi Persediaan; dan
 - 3. Sub Bagian Optimalisasi dan Investasi Pemerintah Daerah.
- h. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah; dan
 - 2. Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional tertentu; dan
- j. Unit Pelaksana Teknis Badan.

Uraian tugas untuk tiap struktur adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan keuangan.

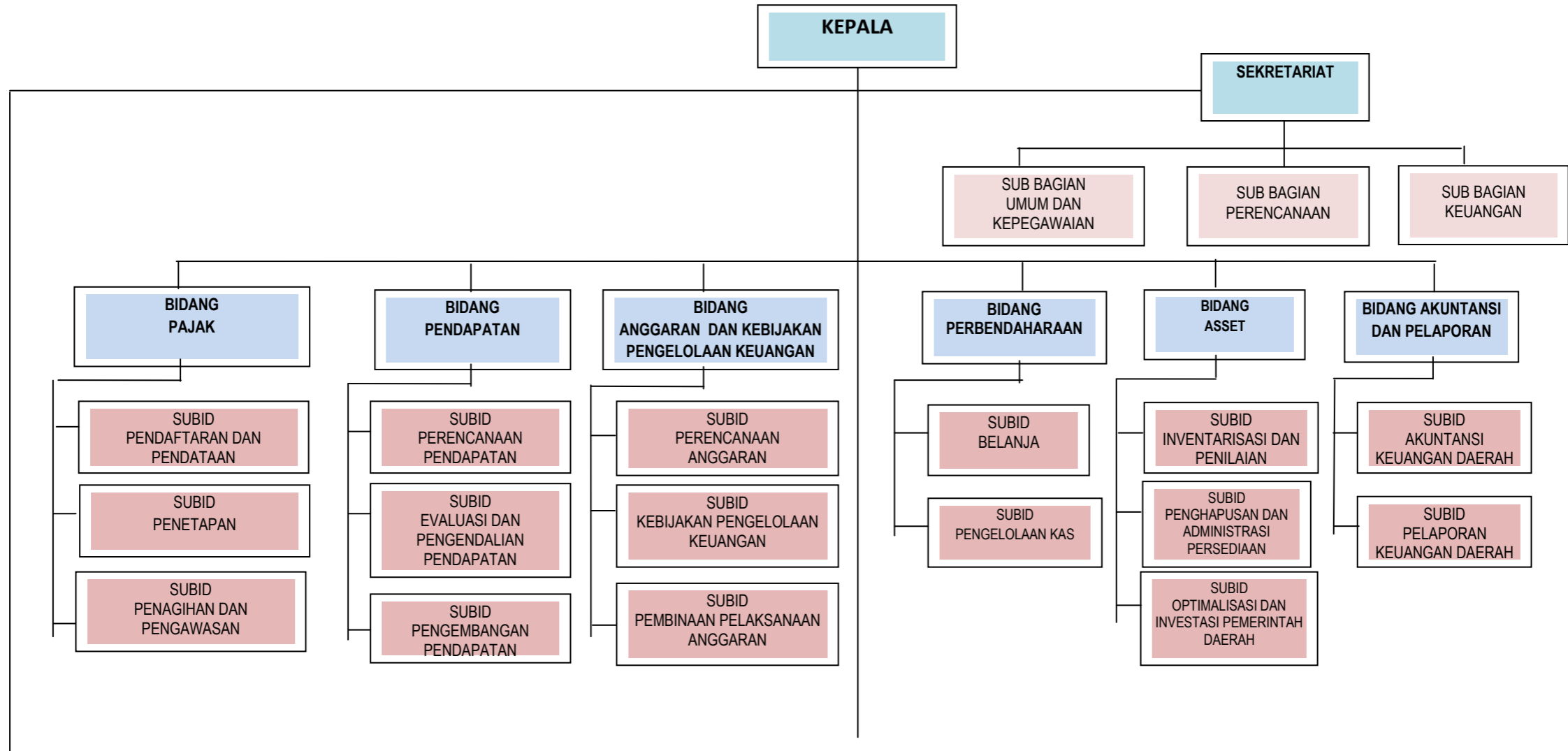
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, sarana dan prasarana, ketatausahaan, kehumasan, kearsipan dan kepustakaan serta administrasi kepegawaian.
- b. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program.
- c. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan SKPD dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

2. Bidang Pajak mempunyai fungsi penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan, penetapan serta penagihan dan pengawasan pajak.
 - a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas menyelenggarakan pendaftaran dan pendataan pajak.
 - b. Sub Bidang Penetapan mempunyai tugas menyelenggarakan penetapan pajak.
 - c. Sub Bidang Penagihan dan Pengawasan mempunyai tugas menyelenggarakan penagihan dan pengawasan pajak.
3. Bidang Pendapatan mempunyai fungsi penyelenggaraan perencanaan pendapatan, evaluasi dan pengendalian pendapatan serta pengembangan pendapatan.
 - a. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan pendapatan.
 - b. Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan mempunyai tugas menyelenggarakan evaluasi dan pengendalian pendapatan.
 - c. Sub Bidang Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan pendapatan.
4. Bidang Anggaran dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan mempunyai fungsi penyelenggaraan perencanaan anggaran, kebijakan pengelolaan keuangan serta pembinaan pelaksanaan anggaran.
 - a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan anggaran.
 - b. Sub Bidang Kebijakan Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan.
 - c. Sub Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan

administrasi keuangan daerah yang berkaitan dengan pembinaan pelaksanaan anggaran.

5. Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi penyelenggaraan belanja dan pengelolaan Kas Daerah.
 - a. Sub Bidang Belanja mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan belanja.
 - b. Sub Bidang Pengelolaan Kas mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan Kas Daerah.
6. Bidang Aset mempunyai fungsi penyelenggaraan inventarisasi dan penilaian, penghapusan dan administrasi persediaan serta optimalisasi dan investasi Pemerintah Daerah.
 - a. Sub Bidang Inventarisasi dan Penilaian mempunyai tugas menyelenggarakan inventarisasi dan penilaian Barang Milik Daerah.
 - b. Sub Bidang Penghapusan dan Administrasi Persediaan mempunyai tugas menyelenggarakan Penghapusan Barang Milik Daerah dan Penatausahaan Barang Persediaan Pemerintah Daerah.
 - c. Sub Bidang Optimalisasi dan Investasi Pemerintah Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah dan investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
7. Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi penyelenggaraan akuntansi keuangan daerah dan pelaporan keuangan daerah.
 - a. Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan akuntansi keuangan Daerah.
 - b. Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan pelaporan keuangan Daerah.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



—
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL TERTENTU

UPTB

2.2. Sumber Daya BKAD

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik secara administrasi maupun operasional pada Badan Keuangan dan Aset Daerah perlu adanya dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki.

Adapun sumber daya tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia/personil yang dimiliki oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas BKAD Kabupaten Kulon Progo yang terbentuk dan efektif melaksanakan tugas dan fungsi pada awal tahun 2017, didukung dengan sumber daya manusia yang bervariasi. Jumlah keseluruhan pegawai sebanyak : 86 Orang, yang terdiri dari berbagai tingkat pendidikan mulai dari SMA hingga sarjana strata-2. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap jalannya organisasi. Kepegawaian BKAD dapat dirinci dalam matriks sebagai berikut :

Tabel 2.1

Pegawai menurut Golongan/Ruang

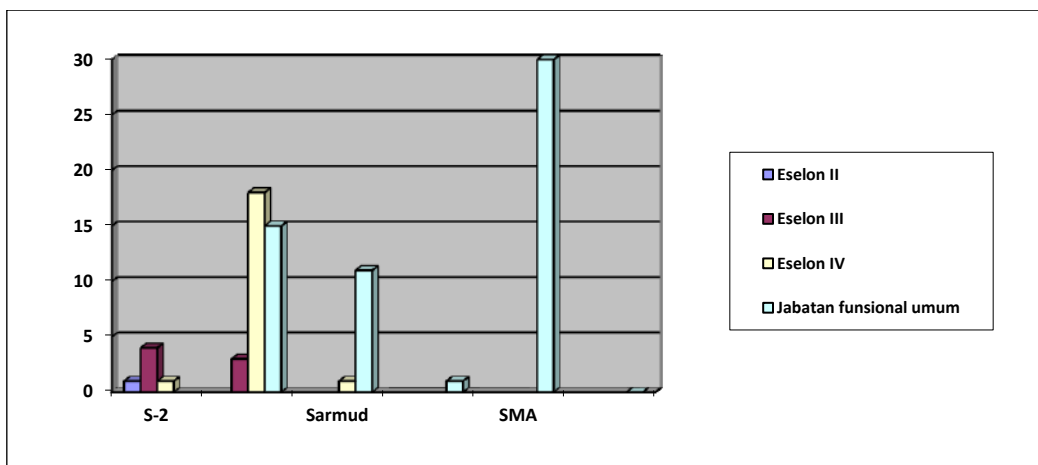
No	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)
1.	Pembina utama muda(IV/c)	1
2.	Pembina Tk.I (IV/b	1
3.	Pembina (IV/a)	6
4.	Penata Tk.I (III/d)	10
5.	Penata (III/c)	11
6.	Penata Muda Tk. I (III/b)	26
7.	Penata Muda (III/a)	13
8.	Pengatur Tk. I (II/d)	5
9.	Pengatur (II/c)	9
10.	Pengatur Muda Tk.I(IIb)	1

11.	Pengatur Muda (II/a)	2
-----	----------------------	---

Tabel 2.2
Pegawai menurut latar belakang pendidikan formal

No	Tingkat pendidikan	Jumlah (orang)
1.	S- 2 (Pasca Sarjana)	7
2.	S- 1 (sarjana)	36
3.	D III (deploma)	12
4.	D I	1
5.	SLTA)	30

Tingkat pendidikan Sumber Daya Manusia di BKAD dapat dilihat dalam grafik dibawah ini:



Tabel 2.3
Pegawai menurut Eselon

No	Eselon	Jumlah (orang)
1.	Kepala Badan (Eselon II)	1
2.	Sekretaris (Eselon III)	1
3.	Kepala Bidang (Eselon III)	6

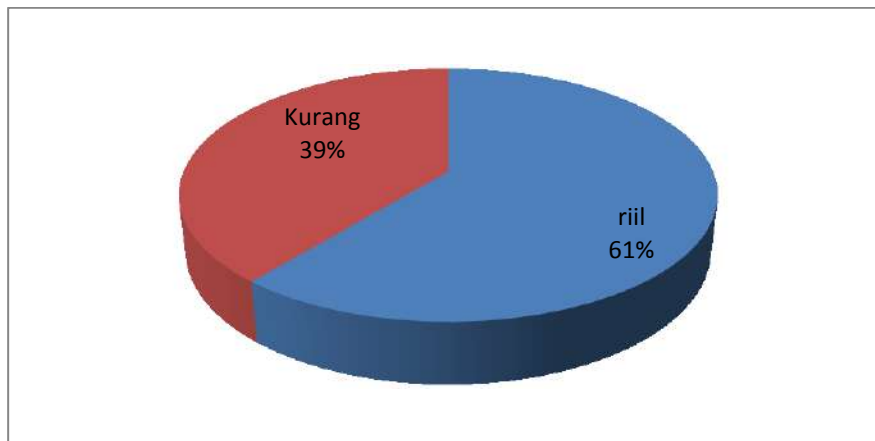
4.	Kepala Sub bagian (Eselon IV)	3
5.	Kepala Sub Bidang (eselon IV)	16

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai yang ada di BKAD Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2017

No	Unit Organisasi	Kebutuhan	Riil	Kurang/lebih
1	Kepala BKAD	1	1	0
2	Sekretariat	25	13	12
3	Bidang Pajak	32	16	16
4	Bidang Pendapatan	21	13	8
5	Bidang Anggaran dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan	16	12	4
6	Bidang Perbendaharaan	18	12	6
7	Bidang Aset	18	11	7
8	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	11	8	3
		141	86	55

Dari formasi yang diperlukan sebanyak 141 personil baru terisi 86 personil, sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 55 personil. Untuk mengatasi keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki, BKAD melakukan optimalisasi personil dengan menambah beban tugas terhadap personil yang ada dan mengusulkan tambahan pegawai ke BKPP.

Gambar 1
Kondisi Pegawai BKAD



Sedangkan pendidikan dan pelatihan teknis yang pernah diikuti oleh pegawai di BKAD Kabupaten Kulon Progo, antara lain tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.5
Pendidikandan pelatihan teknis yang pernahdiikuti

No.	Diklat teknis	Pst
1.	LKD	1
2.	Pengelolaan Keuangan daerah	2
3.	Pengelola barang	1
4.	AKD	1
5.	Bimtek Permendagri No.13/2006	1
6.	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	3
7.	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1
8.	KKD	9

No.	Diklat teknis	Pst
9.	Bimtek Implementasi Permendagri No. 59/2007	1
10.	Bimtek SPIP	2
11.	Bimtek SIMDA Keuangan, Gaji dan BMD	3
12.	Bimtek Penyusunan Renstra	2

Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian, BKAD 2017.

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dikuasai/dimiliki oleh BKAD sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi yaitu:

Tabel 2.6
Jumlah asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

No	Nama barang	Jumlah asset yang dimiliki (Rp)		Jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp.	Unit	Rp.	
1	Mobil	5	446.875.750			
2	Sepeda Motor	41	356.760.564	2	13.600.000	
3	Mesin Ketik	10	15.244.694	1	625.000	
4	Fingerscan	-	-	1	2.544.700	
5	Almari	49	22.405.336			
6	Rak Arsip	33	27.351.000			
7	Filling Kabinet	33	34.821.510			
8	Brankas	14	26.921.665			
9	Perforator	3	17.500.000			
10	Rak Server	1	18.983.428			
11	Kursi Putar	21	17.882.500	2	211.000	
12	Kursi Kerja	207	46.075.707			
13	Kursi Rapat	53	21.146.391			
14	Meja Kerja	141	24.892.502			
15	Meja Rapat	19	10.544.051			

No	Nama barang	Jumlah asset yang dimiliki (Rp)		Jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)		Keterangan
16	Meja Kursi Tamu	5	12.820.941			
17	Bangku Tunggu	4	6.072.000			
18	Meja Komputer	27	9.957.814			
19	AC	14	90.156.087	3	8.642.000	
24	Televisi	2	15.814.042			
25	Amplifier	1	2.145.000			
26	Mikrofone	4	6.825.000			
28	UPS	16	60.452.735	2	6.371.624	
29	Kamera digital	1	1.000.000			
31	Alat Antrian	1	11.302.500			
32	Alat Pemadam	2	1.551.000			
33	Komputer	58	387.385.624	3	19.398.278	
34	Server	7	249.740.756			
35	Laptop	25	274.993.213			
36	Printer	32	353.178.707	7	28.540.641	
37	Hardisk Eksternal	4	4.436.814			
38	LCD	3	22.641.031			
39	Scanner	1	2.247.364	1	1.721.915	
40	Mesin Fax	1	2.217.000			
41	Aset lainnya	49	12.779.248	3	85.000	
	Jumlah	887	2.612.096.736	21	81.740.158	

Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian BKAD 2017

2.3. Kinerja Pelayanan BKAD

BKAD sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari penganggaran sampai proses

pertanggungjawaban APBD dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan keuangan daerah serta pengelolaan aset daerah.

Kegiatan pelayanan dibidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan SKPD, melakukan pembinaan berupa sosialisasi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah.

Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan PD diukur berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya,

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran, capaian Indikator Kinerja Utama yang juga merupakan Indikator Sasaran BKAD telah terealisasi 98,10% dengan kategori kriteria penilaian sangat tinggi (91% - 100%).

Realisasi pendapatan pada tahun 2016 dalam APBD sebesar Rp 1.358.070.852.125,32 dengan prosentase capaian 98,50% dari target Rp 1.378.759.900.977,90. Sedangkan realisasi belanja pada tahun 2016 sebesar Rp 1.388.654.648.380,40 dibanding rencana belanja pada APBD tahun 2016 sebesar Rp 1.478.932.036.193,42 dengan prosentase capaian sebesar 99,90 %

Jumlah dokumen keuangan daerah yang ditetapkan tepat waktu dari target 3 (tiga) dokumen yang meliputi APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD terealisasi 3 (tiga) dokumen dengan capaian 100% dan untuk SKPD tertib administrasi asset telah dilakukan oleh semua SKPD.

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKAD tahun 2016

Kinerja					Keuangan			
Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	%	Program	Target	Realisasi	%

Renstra BKAD 2017-2022

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset	Capaian peningkatan realisasi pendapatan pengelolaan keuangan dan asset	100	98,10	98,10	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.478.932.036.193,42	1.388.654.648.380,40	93,90
--	---	-----	-------	-------	--	----------------------	----------------------	-------

Selain melakukan pengukuran atas kinerja pada Tahun 2016, kami juga mencoba melakukan perbandingan terhadap capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Tujuan perbandingan ini adalah untuk melihat progress capaian per tahun dan juga untuk mengetahui capaian kinerja saat ini terhadap target kinerja pada akhir Renstra.

Tabel 2.8
Capaian kinerja pelayanan BKAD 2012 - 2016

No	Indikator kinerja	Satuan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator or lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Ratio Realisasi Capaian Tahun				
						2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
	Capaian peningkatan realisasi pendapatan pengelolaan keuangan dan aset	%	-		100	99	98.62	100	100	100	98.08	98.51	98.30	98.06	98.10	99.07	99.87	98.30	98.06	98.10

Tabel 2.9
 Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan BKAD Kabupaten Kulon Progo
 Tahun 2012-2016

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Ratio Realisasi Capaian Tahun					Rata Rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	250,398,500.00	343,023,000.00	252,582,300	203,719,825	210,799,175	234,828,935	317,991,620	245,272,591	202,297,539	208,334,990	0,94	0,93	0,97	0,99	0,99	-1.31	-0.50
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,00.00	4,500,000.00	4,500,000	0	0	3,579,820	4,136,580	4,223,750	0	0	0,72	0,92	0,94	0	0	-55.00	-27.45
Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran	0	0	0	61,698,225	67,705,675	0	0	0	61,102,512	67,705,400	0	0	0	0,99	1,00	9.74	9.74
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39,960,000.00	58,200,000.00	44,000,000	0	0	37,782,615	51,926,840	41,566,116	0	0	0,95	0,89	0,94	0	0	-26.25	-28.99
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4,107,500.00	5,400,000.00	5,998,000	0	0	4,088,600	5,340,500	5,338,500	0	0	1,00	0,99	0,89	0	0	-19.15	-29.15
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	43,500,000.00	45,975,000.00	38,040,000	38,040,000	41,249,500	37,500,000	41,075,000	35,590,000	37,790,000	41,247,000	0,86	0,89	0,94	0,99	1,00	-0.78	0.18
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3,000,000.00	2,943,000.00	5,153,000	0	0	3,000,000	2,943,000	5,139,250	0	0	1,00	1,00	1,00	0	0	-8.94	-8.94
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	23,345,000.00	20,000,000.00	20,000,000	0	0	23,340,000	20,000,000	20,000,000	0	0	1,00	1,00	1,00	0	0	-14.33	-14.31
Penyediaan Alat Tulis Kantor	20,000,000.00	20,000,000.00	18,746,600	0	0	20,000,000	19,999,800	18,729,000	0	0	1,00	1,00	1,00	0	0	-35.42	-35.42

Renstra BKAD 2017-2022

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17,500,000.00	13,155,000.00	18,214,500	0	0	17,499,900	13,154,500	18,212,875	0	0	1,00	1,00	1,00	0	0	-28.79	-28.79
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,400,000.00	2,100,000.00	3,752,200	0	0	1,398,600	2,100,000	3,752,000	0	0	1,00	1,00	1,00	0	0	9,61	9,61
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000	0	0	1,000,000	1,500,000	1,500,000	0	0	1,00	1,00	1,00	0	0	-16.67	-16.67
Penyediaan Makanan dan Minuman	15,296,000.00	17,120,000.00	20,328,000	0	0	15,218,900	16,941,000	18,882,000	0	0	0,99	0,99	0,93	0	0	-23.11	-23.32
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	71,540,000.00	86,880,000.00	58,000,000	0	0	65,670,500	78,629,400	57,999,100	0	0	0,92	0,91	1,00	0	0	-37.27	-37.84
Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi dalam daerah	0	0	0	103,981,600	101,844,000	0	0	0	103,405,027	99,382,590	0	0	0	0,99	1,00	-2.06	-2.06
Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah	1,500,000.00	2,000,000.00	2,000,000	0	0	1,500,000	1,995,000	1,990,000	0	0	1,00	1,00	1,00	0	0	-22.22	-22.42
Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap	3,250,000.00	3,250,000.00	4,550,000	0	0	3,250,000	3,250,000	4,550,000	0	0	1,00	1,00	1,00	0	0	-20.00	-20.00
Penyediaan jasa pelayanan kantor	0	0	7,800,000	0	0	0	0	7,800,000	0	0	0	0	1,00	0	0	0	0
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	980,436,370.00	616,540,800.00	368,873,900	0	0	895,661,890	565,920,776	356,977,205	0	0	0,91	0,92	0,97	0	0	-59.10	-57.91
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0	186,075,100.00	0	0	0	0	180,975,750	0	0	0	0	0,97	0	0	0	0.00	0.00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	26,136,600.00	53,526,400.00	0	0	0	22,871,600	50,716,850	0	0	0	0,88	0,95	0	0	0	4.79	21.75
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	767,999,500.00	152,355,000.	222,147,100	0	0	689,762,700	147,584,200	216,722,925	0	0	0,90	0,97	0,98	0	0	-44,78	-43,92
Pengadaan Mebeleur	14,000,000.00	42,882,800.00	0	0	0	13,700,000.	40,766,900	0	0	0	0,98	0,95	0	0	0	53,15	97,57
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	10,500,000.00	4,500,000.00	3,000,000	0	0	10,346,500	4,230,000	2,498,500	0	0	0,99	0,94	1,00	0	0	-63,49	-66,68

Renstra BKAD 2017-2022

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	152,800,270.00	167,701,500.00	135,699,800	0	0	149,981,090	132,177,076	129,289,030	0	0	0,98	0,79	0,95	0	0	-36,44	-38,02
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4,000,000.00	4,000,000.00	2,500,000	0	0	4,000,000	3,995,000	2,498,500	0	0	1,00	1,00	1,00	0	0	-45,83	-45,86
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	3,000,000.00	3,500,000.00	3,500,000	0	0	3,000,000	3,475,000	3,490,000	0	0	1,00	0,99	1,00	0	0	-27,78	-27,91
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	1,980,000	0	0	1,00	1,00	1,00	0	0	-33,33	-33,67
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	0	0	0	503,306,360	863,643,395	0	0	0	473,749,406	823,502,725	0	0	0	0,94	0,95	71,59	73,83
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	00	0	0	238,938,650	552,168,775	0	0	0	225,593,650	527,304,026	0	0	0	0,94	0,95	131,09	133,74
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	0	0	0	264,367,710	311,474,620	0	0	0	248,155,756	296,198,699	0	0	0	0,94	0,95	17,82	19,36
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10,500,000.00	10,000,000.00	10,000,000	24,435,500	12,000,000	10,400,000	8,600,000	10,000,000	23,986,000	12,000,000	0,99	0,86	1,00	0,98	1,00	22,18	22,22
Pendidikan dan Pelatihan non Formal	10,500,000.00	10,000,000.00	10,000,000	8,000,000	12,000,000	10,400,000	8,600,000	10,000,000	7,600,000	12,000,000	0,99	0,86	1,00	0,95	1,00	6,31	8,22
Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)	0	0	0	16,435,500	0	0	0	0	16,386,000	0	0	0	0	1,00	0	100	100
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8,250,800.00	10,650,125.00	12,840,000	0	0	8,140,700	10,467,975	12,679,400	0	0	0,99	0,98	0,99	0	0	16,79	16,95
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,716,000.00	2,750,000.00	3,000,000	0	0	2,611,900	2,568,125	2,997,450	0	0	0,96	0,93	1,00	0	0	25,13	25,57
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	1,795,200.00	0	0	0	0	1,795,200	0	0	0	0	1,00	0	0	0	0	100	100
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	1,949,400.00	2,800,125.00	0	0	0	1,949,400	2,799,900	0	0	0	1,00	1,00	0	0	0	56,36	56,37

Renstra BKAD 2017-2022

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1,790,200.00	0	0	0	0	1,784,200.	0	0	0	0	1,00	0	0	0	0	100	100
Penyusunan Pelaporan Keuangan	0	5,100,000.00	9,840,000	0	0	0	5,099,950	9,681,950	0	0	0	1,00	0,98	0	0	7.06	10.16
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	2,836,000.00	2,000,000.00	7,000,000	0	0	2,370,800.	1,924,900	6,918,850	0	0	0,84	0,96	0,99	0	0	40.17	43.73
Penyusunan Renstra SKPD	1,439,000.00	0	3,000,000	0	0	973,850.	0	2,946,300	0	0	0,68	0	0,98	0	0	66.67	66.67
Penyusunan Rencana Kerja SKPD	1,397,000.00	2,000,000.00	4,000,000	0	0	1,396,950.	1,924,900	3,972,550	0	0	1,00	0,96	0,98	0	0	14.39	14.72
Program Pengawasan dan Pengendalian Program	2,384,000.00	3,500,000.00	4,500,000	0	0	2,296,750.	3,445,600	4,365,675	0	0	0,96	0,98	0,97	0	0	-8.21	-7.76
Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaksanaan program dan kegiatan	2,384,000.00	3,500,000.00	4,500,000	0	0	2,296,750.	3,445,600	4,365,675	0	0	0,96	0,98	0,97	0	0	-8.21	-7.76
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	0	0	0	22,000,000	21,911,975	0	0	0	21,800,375	21,904,475	0	0	0	0,94	1,00	-0.40	0.48
Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	3,827,200	3,998,850	0	0	0	0,96	1,00	0.00	4.49
Penyusunan Laporan Keuangan	0	0	0	10,000,000	9,911,975	0	0	0	9,996,725	9,911,975	0	0	0	1,00	1,00	-0.88	-0.88
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	0	0	0	8,000,000	8,000,000	0	0	0	7,976,450	7,996,000	0	0	0	1,00	1,00	0.00	-0.85
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1,554,091,300.00	2,002,510,850.	2,204,170,290	2,668,238,400	2,597,427,800	1,317,850,420.	1,797,066,225	2,062,688,400	2,592,862,149	2,567,866,211	0,85	0,90	0,94	0,97	0,99	14.33	18.97
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	141,594,700.00	0	0	0	0	128,258,650.	0	0	0	0	0,91	0	0	0	0	0	0

Renstra BKAD 2017-2022

10Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	122,057,450.00	0	0	0	0	113,994,450.	0	0	0	0	0,93	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD serta Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	0	224,200,000.00	222,300,000	222,300,000	220,850,000	0	137,562,800	194,072,050	214,128,900	213,321,245	0	0,82	0,87	0,96	0,97	-0.50	17.01
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD	82,179,000.00	81,686,250.00	78,593,150	78,593,000	84,601,625	70,156,500.	78,387,600	77,491,300	77,835,270	84,127,625	0,85	0,96	0,99	0,99	0,99	0.81	4.78
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	104,320,950.00	42,773,200	0	0	0	63,221,000.	40,559,000	0	0	0	0,61	0,95	0	0	0	-79.50	-67.92
Penelitian DPA-L, DPA dan DPPA SKPD	8,819,400.00	14,390,000.00	14,000,000	0	0	8,615,400	13,351,250	12,732,450	0	0	0,98	0,93	0,91	0	0	-19.77	-24.83
Penyusunan Anggaran Kas dan Penelitian DPA-L, DPA dan DPPA SKPD	0	0	0	14,000,000	14,000,000	0	0	0	12,595,600	13,918,050	0	0	0	0,90	0,99	0.00	10.50
Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah	2,710,000.00	0	0	0	0	2,710,000	0	0	0	0	1,00	0	0	0	0	0	0
Pemungutan PBB Pedesaan dan Perkotaan	249,040,000.00	209,847,000	503,342,665	0	0	234,766,020	195,152,725	493,072,125	0	0	0,94	0,93	0,98	0	0	8.04	17.89
Pelaksanaan Pembukuan Penerimaan dan Pengeluaran APBD	11,252,600.00	14,236,600	10,000,000	10,000,000	0	11,022,600	13,904,575	9,999,825	9,609,875	0	0,98	0,98	1,00	0,9*6	0	-25.81	-25.90
Implementasi dan Kustomisasi Sistem Informasi Keuangan Daerah	171,316,100.00	89,000,000	88,821,800	87,522,900	98,352,300	117,194,800	84,300,000	88,669,650	85,199,750	96,237,100	0,68	0,95	1,00	0,97	0,98	-9.33	-3.46

Renstra BKAD 2017-2022

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Dana Tugas Pembantuan	20,556,000.00	22,000,000	17,894,000	17,486,000	17,486,000	19,601,000	20,773,200	17,714,750	17,437,375	17,470,000	0,95	0,94	0,99	1,00	1,00	-3.48	-3.74
Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Barang Daerah	42,780,000.00	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	40,200,750	22,991,825	28,424,000	29,216,750	29,236,350	0,94	0,77	0,95	0,97	0,97	-7.47	-4.08
Pengelolaan Dana Bantuan	16,936,750.00	18,316,650	22,618,650	18,041,000	0	16,936,750	18,293,400	22,557,175	17,889,850	0	1,00	1,00	1,00	0,99	0	-22.15	-22.19
Pengelolaan Dana-Dana PPKD	0	0	0	0	18,041,000	0	0	0	0	18,040,800	0	0	0	0	1,00	0	0
Pengelolaan, Pengendalian Gaji Pegawai Daerah, BTL non Gaji dan SIM GAJI	105,432,500.00	115,300,000	115,300,000	0	0	104,372,500	112,261,950	109,555,100	0	0	0,99	0,97	0,95	0	0	-45.32	-47.43
Pengelolaan dan Pengendalian Belanja Langsung	0	0	0	24,572,700	31,895,900	0	0	0	23,781,200	31,569,800	0	0	0	0,97	0,99	29.80	32.75
Pengelolaan dan Pengendalian Belanja Tidak Langsung (BTL)	0	0	0	114,427,600	113,527,600	0	0	0	107,555,050	112,906,400	0	0	0	0,94	0,99	-0.79	4.98
Pendaftaran Pendataan Obyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah serta Monitoring dan pemungutan pajak-pajak daerah	78,831,350.00	100,744,000	91,263,000	0	0	78,831,350	97,387,150	91,132,325	0	0	1,00	0,97	1,00	0	0	-81.61	-85.87
Penyediaan dan Pembaharuan Data Perhitungan Dana Perimbangan	14,340,000.00	10,000,000	15,000,000	0	0	12,850,900	7,949,200	14,929,450	0	0	0,90	0,79	1,00	0	0	-40.13	-28.38
Penyusunan Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	0	0	0	128,100,550	148,149,950	0	0	0	127,982,750	148,060,594	0	0	0	1,00	1,00	26.51	26.47
Verifikasi, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pendapatan Daerah	10,000,000.00	12,000,000	12,720,000	24,895,925	20,996,500	10,000,000	11,827,250	12,719,800	24,894,825	20,996,500	1,00	0,99	1,00	0,99	1,00	16.66	13.98
Rekonsiliasi Realisasi Pelaksanaan APBD	9,778,700.00	8,000,000	15,821,800	14,112,000	13,812,000	9,778,700	7,669,000	13,921,700	13,924,000	13,361,500	1,00	0,96	0,88	0,99	0,97	15.65	15.69
Penyusunan dan Kustomisasi Sistem Informasi Pendapatan daerah	11,000,000.00	52,276,300	41,123,300	0	0	10,933,950	51,655,650	41,046,175	0	0	0,99	0,99	1,00	0	0	84.63	83.02
Penghapusan Barang Inventaris dan	104,262,400.00	42,777,500	67,156,500	49,876,300	55,171,300	96,055,300	37,374,750	62,941,625	48,524,050	51,131,000	0,92	0,87	0,94	0,97	0,93	-4.27	-3.32

Renstra BKAD 2017-2022

Barang Bongkaran Gedung																	
Manajemen kas umum daerah	33,416,000.00	26.140.000	0	0	0	30,396,000	24,393,200	0	0	0	0,92	0,93	0	0	0	-60.89	-63.50
Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Umum Daerah	0	0	74,172,200	73,983,000	58,600,400	0	0	67,926,600	72,268,930	57,583,058	0	0	0,92	0,98	0,98	-10.52	-6.96
Pemantauan pelaksanaan investasi non permanen	54,078,500.00	8,000,000	14,760,000	0	0	45,617,500	6,227,100	13,353,000	0	0	0,84	0,78	0,90	0	0	-50.35	-50.92
Penyusunan laporan realisasi APBD semester I dan prognosis	9,000,000.00	13,500,000	13,438,000	13,438,000	12,438,000	8,988,900	12,732,650	13,432,650	13,272,825	11,809,000	1,00	0,94	1,00	0,99	0,95	10.52	8.69
Penerbitan SPD, SP2D, dan Verifikasi SPM	18,432,000.00	20,000,000	34,200,200	0	0	18,405,150	16,971,000	34,100,750	0	0	1,00	0,85	1,00	0	0	-10.25	-3.50
Penyusunan Target Pendapatan Daerah	11,442,250.00	171,755,350	72,919,500	0	0	11,007,250	161,369,900	72,598,625	0	0	0,96	0,94	1,00	0	0	621.76	577.64
Persiapan peralihan PBB Perdesaan dan Perkotaan Menjadi Pajak Daerah	120,514,650.00	373,650,750	0	0	0	54,341,650	293,289,550	0	0	0	0,45	0,78	0	0	0	55.02	169.86
Pendampingan pelaksanaan akuntansi berbasis akrual	0	13,467,850	0	9,020,000	0	0	11,705,500	0	8,980,950	0	0	0,87	0	1,00	0	0	0
Persiapan pelaksanaan akuntansi berbasis akrual	0	0	25,401,000	0	0	0	0	25,270,500	0	0	0	0	0,99	0	0	0	0
Sensus barang daerah	0	288,449,400	0	0	0	0	272,300,000	0	0	0	0	0,94	0	0	0	0	0
Fasilitasi investasi, monitoring dan evaluasi BUMD	0	0	9,741,900	0	0	0	0	9,601,750	0	0	0	0	0,99	0	0	0	0
Monitoring dan Evaluasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD	0	0	0	23,354,750	19,596,650	0	0	0	22,789,050	19,466,625	0	0	0	1,00	0,99	-16.09	-14.58
Rekonsiliasi dan validasi data barang/aset daerah	0	0	9,938,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan pemungutan BPHTB	0	0	16,060,650	0	0	0	0	13,459,750	0	0	0	0	0,84	0	0	0	0

Renstra BKAD 2017-2022

Pelayanan dan Validasi Data BPHTB	0	0	0	16,033,800	15,392,000	0	0	0	15,908,675	15,392,000	0	0	0	0,99	1,00	-4.00	-3.25
Rekonsiliasi Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum	0	0	5,880,000	5,758,500	9,828,400	0	0	5,861,950	5,713,500	9,828,300	0	0	1,00	0,99	1,00	34.31	34.74
Basis Data Pembaharuan Perhitungan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	285,074,650	242,494,400	237,872,000	0	0	254,743,650	218,874,145	231,527,950	0	0	0,89	0,90	0,97	-8.42	-4.15
Penagihan PBB Pedesaan dan Perkotaan	0	0	68,622,450	556,867,650	566,652,700	0	0	64,747,400	556,317,525	565,957,600	0	0	0,94	1,00	1,00	237.75	253.65
Rekonsiliasi Data Piutang PBB Pedesaan dan Perkotaan	0	0	0	58,134,000	54,643,800	0	0	0	57,549,975	52,818,400	0	0	0	0,99	0,97	-6.00	-6.00
Penetapan Pajak Daerah Non PBB dan Non BPHTB	0	0	0	62,486,000	64,448,000	0	0	0	62,294,000	64,393,000	0	0	0	1,00	1,00	3.14	3.37
Penagihan pajak daerah Non PBB dan Non BPHTB	0	0	0	67,016,000	59,835,000	0	0	0	66,444,825	59,485,000	0	0	0	0,99	0,99	-10.72	-10.47
Perekaman data dan penetapan PBB Pedesaan dan Perkotaan	0	0	0	199,746,000	123,805,700	0	0	0	198,522,604	122,919,639	0	0	0	0,99	0,99	-38.02	-38.08
Sosialisasi dan distribusi dokumen PBB Pedesaan dan Perkotaan	0	0	0	0	334,784,800	0	0	0	0	334,771,250	0	0	0	0	1,00	0	0
Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak dan Subyek Pajak Daerah Non PBB dan Non BPHTB	0	0	0	74,851,625	48,998,200	0	0	0	74,782,900	48,988,200	0	0	0	1,00	1,00	-34.54	-34.49
Akuntansi dan Pelaporan Aset Daerah	0	0	107,067,550	0	0	0	0	92,804,750	0	0	0	0	0,87	0	0	0	0
Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Daerah	0	0	0	36,282,000	0	0	0	0	35,652,150	0	0	0	0	0,98	0	0	0
Penilaian dan Optimalisasi Barang Milik Daerah	0	0	25,307,000	48,581,100	25,171,075	0	0	18,622,775	47,920,600	25,106,025	0	0	0,74	0,99	1,00	21.89	54.86
Penatausahaan Barang Milik Daerah	0	0	49,004,825	0	0	0	0	43,316,200	0	0	0	0	0,88	0	0	0	0

Renstra BKAD 2017-2022

Inventarisasi dan Penataan Aset Daerah	0	0	34,585,500	0	0	0	0	31,177,025	0	0	0	0	0,90	0	0	0	0
Inventarisasi Hasil Pengadaan BMD	0	0	0	11,809,250	11,809,200	0	0	0	11,789,625	11,768,875	0	0	0	1,00	1,00	0	0,17
Penatausahaan, Inventarisasi, Verifikasi hasil pengadaan BMD	0	0	12,042,000	0	0	0	0	10,691,525	0	0	0	0	0,89	0	0	0	0
Penatausahaan Barang Milik Daerah	0	0	0	76,135,700	86,667,700	0	0	0	57,116,375	85,674,325	0	0	0	0,75	0,99	13,83	50,00

Berdasarkan data tabel di atas, terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan anggaran pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 1.31% untuk setiap tahunnya dengan pertumbuhan realisasi -0.50%, untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur rata-rata -59.10% setiap tahunnya dengan pertumbuhan realisasi -57.91%, untuk Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur rata-rata 22,18% dengan pertumbuhan realisasi 22,22%, untuk program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar 16.79% dengan pertumbuhan realisasi 16.95%, sedangkan rata-rata pertumbuhan anggaran pada program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 14.33% dengan pertumbuhan realisasi sebesar 18.97%. Peningkatan terbesar adalah pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Dengan demikian rata-rata pertumbuhan baik anggaran maupun realisasi kurang signifikan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja BKAD dapat menggunakan analisis metode SWOT.

1. Faktor Internal :

a. Kekuatan

1. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
2. Tersedianya alokasi anggaran yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi;
3. Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kelemahan

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kerja

2. Kurangnya jumlah personil yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset.

Faktor Eksternal :

a. Kesempatan/peluang

1. Adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Hubungan kerja dengan instansi terkait telah terjalin dengan baik.
3. Adanya kesamaan pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.
4. Adanya dukungan baik dari pimpinan Eksekutif maupun legislatif.

b. Tantangan/ancaman

1. Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan good governance;
2. Kurangnya jumlah SDM pengelola keuangan dan aset daerah yang melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di BKAD.
3. Pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan semakin ketat

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BKAD

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan, BKAD masih menghadapi beberapa kendala, namun hal tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan dalam proses pelayanan. Berikut ini akan diuraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi BKAD Kabupaten Kulon Progo.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKAD

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi BKAD Kabupaten Kulon Progo, maka peranan BKAD sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung dengan sarana dan prasarana serta sumber daya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

Terkait dengan pelaksanaan kewenangan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah maka penyusunan Rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja BKAD.

Permasalahan yang dihadapi BKAD dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah :

1. Kurangnya SDM di BKAD dalam pelaksanaan tugas sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset.

2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai baik dari segi jumlah dan kelayakan sesuai kebutuhan sehingga mengganggu kecepatan pelayanan dan operasional kegiatan.
3. Kesadaran wajib pajak masih rendah.
4. Belum adanya regulasi tentang pemberian sanksi bagi wajib pajak yang bandel.
5. Ketepatan waktu penyusunan APBD baik murni maupun perubahan sangat tergantung dengan penetapan KUA/PPAS sehingga ketika KUA/PPAS ditetapkan terlambat atau tidak tepat waktu, otomatis penyusunan APBD dan penyampaian Nota keuangan ke DPRD menjadi Tidak Tepat Waktu (TTW).
6. Perubahan kebijakan dari pusat maupun daerah yang sulit diprediksi sehingga membuat kesulitan dalam penentuan target output perubahan perkada mendahului perubahan APBD.
7. Terkait kebijakan dari pusat mengenai Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang harus memberikan ruang fleksibilitas dalam perencanaan dan penganggaran, disisi lain tidak diperbolehkan adanya SILPA yang memadai sebagai cadangan kas.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 bahwa Visi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo yang ditetapkan untuk Tahun 2017-2022 adalah :

“Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tentram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”.

Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, BKAD mempunyai fungsi penyelenggaraan Urusan

Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip good governance.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2017-2022 serta sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang keuangan yang diselenggarakan maka fungsi dan tugas BKAD terkait erat dengan pencapaian misi ke-3, yaitu **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang tertib, aman, dan tenteram”**.

Dalam upaya melaksanakan tugas tersebut sangat dipengaruhi berbagai faktor baik faktor penghambat maupun pendorong. Faktor-faktor penghambat diantaranya:

1. Keterbatasan jumlah dan kualitas kemampuan SDM, sehingga mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan di BKAD.
2. Sarana prasarana kantor yang kurang memadai baik dari segi gedung, jumlah dan kelayakan sesuai kebutuhan sehingga mengganggu kecepatan pelayanan dan operasional kegiatan.

Faktor-faktor pendorong:

1. Peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan aset ;
2. Kebijakan dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah
3. Sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih baik.

Tabel 3.1
 Faktor penghambat dan pendorong SKPD
 Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: "Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tentram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa".				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Misi 3 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tentram. Program Prioritas: 1. Program Peningkatan pengelolaan anggaran dan kualitas kebijakan pengelolaan keuangan 2. Program Peningkatan pengelolaan perbendaharaan 3. Program Peningkatan	1. Kurangnya SDM dalam pelaksanaan tugas sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset. 2. Sarana dan prasarana kurang memadai baik dari segi jumlah dan kelayakan sesuai kebutuhan. 3. Kesadaran wajib pajak masih rendah. 4. Belum adanya regulasi tentang pemberian sanksi bagi wajib pajak yang bandel. 5. Ketepatan waktu penyusunan APBD baik murni maupun perubahan sangat tergantung dengan	1. Keterbatasan jumlah dan kualitas kemampuan SDM, yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan di BKAD. 2. Sarana prasarana kantor kurang memadai dari segi gedung, jumlah dan kelayakan sesuai kebutuhan sehingga mengganggu kecepatan pelayanan dan operasional kegiatan 3. Dinamika regulasi/perubahan Kebijakanpemerint	1. Peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan dan aset 2. Kebijakan dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah 3. Sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih baik.

	<p>penerapan akuntansi dan pelaporan</p> <p>4. Program Peningkatan pendapatan daerah</p> <p>5. Program Peningkatan penerimaan pajak daerah</p> <p>6. Program Peningkatan pengelolaan aset daerah</p>	<p>penetapan KUA/PPAS sehingga ketika KUA/PPAS ditetapkan terlambat atau tidak tepat waktu, otomatis penyusunan APBD dan penyampaian Nota keuangan ke DPRD menjadi TTW.</p> <p>6. Perubahan kebijakan dari pusat maupun daerah yang sulit diprediksi sehingga membuat kesulitan dalam penentuan target output perubahan perkara mendahului perubahan APBD.</p> <p>7. Terkait kebijakan dari pusat mengenai Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang harus memberikan ruang fleksibilitas dalam perencanaan dan penganggaran, disisi lain tidak diperbolehkan adanya SILPA yang memadai sebagai cadangan kas.</p>	<p>ah pusat.</p>	
--	--	--	------------------	--

3.3Telahaan renstra Kementerian Keuangan dan Renstra DPPKA DIY

3.3.1 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Keuangan

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019, Kementerian Keuangan telah menyusun Rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan di Kementerian Keuangan.

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, potensi dan permasalahan, serta memperhatikan aspirasi masyarakat maka Visi Kementerian Keuangan untuk tahun 2015-2019 adalah "Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke 21". Dengan visi ini, Kementerian Keuangan dengan sepenuh hati memegang peranan pentingnya dalam menentukan perkembangan negara. Kementerian Keuangan juga memperbaharui misinya agar mencerminkan kegiatan inti dan mandatnya dengan lebih baik yaitu sebagai berikut:

1. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat;
2. Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent;
3. Mengelola neraca keuangan pusat dengan resiko minimum;
4. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif;
5. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.

Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan terjaganya kesinambungan fiskal adalah:

- a. Meningkatnya tax ratio;
- b. Terjaganya rasio utang pemerintah;
- c. Terjaganya devisa anggaran.

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan OPD BKAD Kulon Progo berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Keuangan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Keuangan	Permasalahan Pelayanan BKAD Kulon Progo	Sebagai Faktor	
			Penghambatan	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 2 3 4 5 6 7	Penerimaan pajak negara yang optimal PNBPN yang optimal Perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas Hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang adil dan transparan SDM yang kompotitif Sistem informasi manajemen yang	<ul style="list-style-type: none"> •Keterbatasan kemampuan keuangan daerah karena keterbatasan pendapatan •Terkait kebijakan dari pusat mengenai Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang harus memberikan ruang fleksibilitas dalam perencanaan dan penganggaran, disisi lain tidak 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan jenis sumber pendapatan daerah • Dinamika ketentuan perundangan yang cepat 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya regulasi perpajakan yang relevan • Koordinasi pusat dan daerah yang cukup intensif • Sistem informasi yang terintegrasi • sinkronisasi dan koordinasi antara Pusat,

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Keuangan	Permasalahan Pelayanan BKAD Kulon Progo	Sebagai Faktor	
			Penghambatan	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	terintegrasi Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan kementerian	diperbolehkan adanya SILPA yang memadai sebagai cadangan kas.		Propinsi dan Kabupaten.

3.3.2 Telaahan Rencana Strategis DPPKA DIY

Tidak dilakukan telaahan terhadap Renstra DPPKA Propinsi DIY sehubungan Renstra DPPKA Propinsi DIY belum ditetapkan.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya.

Isu isu strategis dalam ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah adalah:

1. Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Daerah ;

2. Mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah;
3. Mendukung pemerintahan yang bersih dengan melaksanakan Inpres No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi melalui implementasi transaksi non tunai.

Tabel 3.4
Identifikasi Isu-isu strategis

Dinamika Nasional	Dinamika regional/lokal	Lain-lain
Pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel	Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap laporan keuangan daerah.	
	Mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah	
Adanya Inpres No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi pencegahan dan pemberantasa korupsi melalui implementasi transaksi non tunai	Mendukung pemerintahan yang bersih dengan melaksanakan Inpres No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi melalui implementasi transaksi non tunai.	

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKAD

Tujuan dan sasaran ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo.

A. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Adapun tujuan yang akan dicapai BKAD adalah : “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel”.

B. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformalisasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun sasaran yang ingin dicapai BKAD adalah : “Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah”.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BKAD

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Tahun transisi 2017	Target Capaian Setiap Tahun				
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (opini BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Cakupan pengelolaan keuangan dan aset	98,48	99,04	99,22	99,46	99,71	99,97

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Dalam rangka untuk menunjang kelancaran dan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut diatas maka perlu menyusun dan melaksanakan strategi secara tepat yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Strategi dan arah kebijakan juga merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana PD dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Hasil analisa sasaran untuk menentukan faktor kunci keberhasilan dengan dukungan data yang valid dan relevan merupakan syarat awal bagi penetapan strategi. Dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan yang ada untuk lima tahun yang akan datang BKAD Kabupaten Kulon Progo telah menetapkan strategi antara lain :

1. Melaksanakan penyesuaian regulasi dengan kebijakan pusat;
2. Memaksimalkan penggunaan aplikasi sistem informasi sesuai kebutuhan dan dinamika yang berkembang;
3. Optimalisasi penggunaan dan pengamanan aset daerah;
4. Melaksanakan pemberantasan korupsi melalui implementasi transaksi non tunai.

5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan untuk menunjang kelancaran dan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah:

1. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan sarpras yang memadai;

2. Peningkatan aplikasi pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan melakukan pemeliharaan sistem secara berkala
3. Kapasitas SDM yang dimiliki;
4. Penyusunan perencanaan target PAD dengan memperhatikan potensi PAD;
5. Implimentasi transaksi non tunai

Tujuan, sasaran, strategis dan kebijakan BKAD, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Melaksanakan Penyesuaian regulasi dengan kebijakan pusat Memaksimalkan penggunaan aplikasi sistem informasi sesuai kebutuhan dan dinamika yang berkembang Optimalisasi penggunaan dan pengamanan aset daerah Melaksanakan pemberantasan korupsi melalui implementasi transaksi non tunai	Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan sarpras yang memadai Peningkatan aplikasi pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan melakukan pemeliharaan sistem secara berkala Peningkatan kapasitas SDM yang dimiliki Penyusunan perencanaan target PAD dengan memperhatikan potensi PAD Implementasi transaksi non tunai

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan aset daerah Kabupaten Kulon Progo. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Disamping itu sesuai dengan perkembangan dan tuntutan ke depan serta dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022.

Program prioritas yang akan dilaksanakan oleh BKAD Kulon Progo untuk mencapai keberhasilan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran;
3. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
5. Program Peningkatan Pengelolaan Anggaran dan Kualitas Kebijakan Pengelolaan Keuangan;
6. Program Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan;
7. Program Peningkatan Penerapan Akuntansi dan Pelaporan;
8. Program Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah;
9. Program Peningkatan Pendapatan Daerah;

10. Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah.

Sebagai langkah selanjutnya dalam penyusunan dokumen perencanaan di tingkat organisasi perangkat daerah ini adalah dengan menerjemahkan strategi dan kebijakan yang menjadi pegangan dalam menyusun program dan kegiatan BKAD.

Program-program yang ada di BKAD dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang disajikan dalam tabel dibawah ini dengan menyesuaikan pagu yang ada di RPJMD.

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif BKAD
Kabupaten Kulon Progo

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun (2017)		Tahun 1 (2018)		Tahun 2 (2019)		Tahun 3 (2020)		Tahun 4 (2021)		Tahun 5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp.	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset secara tertib, akuntabel dan transparan	Terwujudnya Kinerja Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan secara Tertib, Akuntabel dan Transparan	Cakupan Pengelolaan Keuangan dan Aset			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	20	236,646,600	20	236,645,750	20	184,950,486	20	178,190,227	20	192,691,717	20	232,151,848	20	1,261,276,628	BKAD	Lingkup SKPD
					Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran	12 bulan	77,309,500	12 bulan	77,308,850	12 bulan	60,420,732	12 bulan	58,212,250	12 bulan	62,942,755	12 bulan	75,835,884	12 bulan	412,029,971	BKAD	Lingkup SKPD
					Penyediaan jasa keuangan	12 bulan	57,506,700	12 bulan	57,506,500	12 bulan	44,944,205	12 bulan	43,301,417	12 bulan	46,827,877	12 bulan	56,410,829	12 bulan	306,497,528	BKAD	Lingkup SKPD
					Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi	12 bulan	101,830,400	12 bulan	101,830,400	12 bulan	79,585,549	12 bulan	76,676,560	12 bulan	82,921,085	12 bulan	99,905,135	12 bulan	542,749,129	BKAD	Lingkup SKPD

Renstra BKAD 2017-2022

	Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	20	637,267,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637,267,750	BKAD	Lingkup SKPD	
	Peningkatan sarana dan prasarana kerja dan kualitas SDM OPD	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana kerja dan kualitas SDM OPD	0	0	20	703,831,515	20	533,750,253	20	514,369,587	20	556,210,494	20	670,101,488	20	2,978,263,337	BKAD	Lingkup SKPD
	Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	Peningkatan sarana prasarana kantor	100	349,979,000	100	393,414,600	100	216,596,239	100	208,760,571	100	225,730,228	100	271,907,130	100	316,408,768	BKAD	Lingkup SKPD
	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Biaya pemeliharaan rutin gedung kantor	12 bulan	287,288,750	12 bulan	298,416,915	12 bulan	304,400,174	12 bulan	293,297,508	12 bulan	317,213,923	12 bulan	382,197,602	12 bulan	1,882,814,872	BKAD	Lingkup SKPD
Biaya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional		12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan							
Biaya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor		12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan							
	Pendidikan dan pelatihan non formal	Diklat pendidikan pegawai dan pelatihan non formal.	0	0	3 orang	12,000,000	3 orang	12,753,840	3 orang	12,311,508	3 orang	13,266,343	3 orang	15,996,757	3 orang	66,328,448		
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	100	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	BKAD	Lingkup SKPD
	Pendidikan dan pelatihan non formal	Diklat pendidikan pegawai dan pelatihan non formal.	3 orang	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000		
	Prograam Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	Cakupan perencanaan pengendalian dan evaluasi kinerja	100	50,529,300	100	35,529,300	100	26,830,000	100	25,850,000	100	27,950,000	100	33,680,000	100	200,368,600	BKAD	Lingkup SKPD

Renstra BKAD 2017-2022

Penyusunan perencanaan kinerja SKPD	Rencana kinerja SKPD, Rencana kinerja tahunan SKPD, Penetapan kinerja SKPD, Rencana Strategis SKPD	4 dok	32,500,000	2 dok	8,000,000	2 dok	6,000,000	2 dok	5,680,000	2 dok	6,380,000	2 dok	8,290,000	2 dok	66,850,000	BKAD	Lingkup SKPD
Penyusunan laporan keuangan	Laporan kinerja semester dan tahunan yang akurat dan akuntabel	2 dok	9,529,300	2 dok	9,529,300	2 dok	7,830,000	2 dok	7,500,000	2 dok	8,200,000	2 dok	10,110,000	2 dok	52,698,600	BKAD	Lingkup SKPD
Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bln, triwulan, LAKIP, laporan tahunan, profil kinerja SKPD, penerapan SPIP.	19 dok	8,500,000	19 dok	18,000,000	19 dok	13,000,000	19 dok	12,670,000	19 dok	13,370,000	19 dok	15,280,000	19 dok	80,820,000	BKAD	Lingkup SKPD
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia SKPD	Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD	20	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	BKAD	Lingkup SKPD
Pendidikan dan pelatihan non formal	Diklat pendidikan pegawai dan pelatihan non formal.	3 orang	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	BKAD	Lingkup SKPD
Program Peningkatan Pengelolaan Anggaran dan Kualitas Kebijakan Pengelolaan Keuangan	Cakupan peningkatan pengelolaan anggaran dan kualitas kebijakan pengelolaan keuangan	100	565,129,950	100	564,753,950	100	426,440,000	100	410,880,000	100	444,300,000	100	535,270,000	100	2,946,773,900	BKAD	Lingkup SKPD
Penyusunan APBD	Tersusunnya Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 dok	273,316,600	4 dok	273,316,600	4 dok	206,460,875	4 dok	200,978,175	4 dok	217,316,000	4 dok	259,139,268	4 dok	1,430,527,518	BKAD	Lingkup SKPD

Renstra BKAD 2017-2022

	Tersusunnya Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	4 dok		4 dok		4 dok		4 dok		4 dok		4 dok		4 dok			
	Tersusunnya Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	2 dok		2 dok		2 dok		2 dok		2 dok		2 dok		2 dok			
	Tersusunnya Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	2 dok		2 dok		2 dok		2 dok		2 dok		2 dok		2 dok			
Penelitian DPA dan DPPA SKPD	Terverifikasinya DPA dan DPPA SKPD dan SKPKD untuk APBD Murni dan perubahan APBD	90 dok	14,000,000	88 dok	18,379,000	88 dok	13,883,330	88 dok	11,716,382	88 dok	13,114,161	88 dok	17,226,327	88 dok	88,319,200	BKAD	Lingkup SKPD
Monev dan Perumusan Kebijakan Penyusunan Anggaran	Raperbub tentang SHBJ	3 dok	164,057,150	2 dok	155,597,250	0	0	0	0	0	0	0	0	2 dok	319,654,400	BKAD	Lingkup SKPD
Penyusunan standarisasi Harga dan Biaya	Dokumen hasil appraisal dan Raperbup tentang SHBJ	0	0	0	0	2 dok	117,366,748	2 dok	112,323,365	2 dok	123,031,304	2 dok	147,531,886	2 dok	500,253,303	BKAD	Lingkup SKPD
Perumusan Kebijakan Pengelolaan Keuangan	Dokumen Raperbup tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	0	0	0	0	4 dok	50,979,595	4 dok	48,566,564	4 dok	52,430,112	4 dok	63,989,484	4 dok	215,965,755	BKAD	Lingkup SKPD
Monev dan Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Anggaran	Dokumen Raperbup tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	4 dok	59,223,800	4 dok	67,487,700	0	0	0	0	0	0	0	0	4 dok	126,711,500	BKAD	Lingkup SKPD

Renstra BKAD 2017-2022

	Penyusunan pergeseran penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah	Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD	0	0	4 dok	49,973,400	5 dok	37,749,452	5 dok	37,295,514	5 dok	38,408,423	5 dok	47,383,035	5 dok	210,809,824	BKAD	Lingkup SKPD
	Penyusunan Anggaran Mendahului Perubahan APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran mendahului Perubahan	5 dok	54,532,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,532,400	BKAD	Lingkup SKPD
	Program Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan	Cakupan peningkatan pengelolaan perbendaharaan	98.48	340,231,525	99.04	349,378,700	99.22	263,820,000	99.46	254,190,000	99.71	274,820,000	99.97	331,140,000	99.97	1,813,580,225	BKAD	Lingkup SKPD
	Pengelolaan Belanja langsung	Terbitnya SPD, terverifikasinya kelengkapan dokumen SPM Belanja Langsung dan terbitnya SP2D	41 SKPD	31,895,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 SKPD	31,895,900	BKAD	Lingkup SKPD
		Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk semua SKPD	0	0	5 kali		5 kali		5 kali		5 kali		5 kali		5 kali			
		Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk semua SKPD	0	0	66 kali	32,551,900	66 kali	24,489,600	66 kali	22,294,300	66 kali	22,161,700	66 kali	30,764,700	66 kali	132,262,200	BKAD	Lingkup SKPD
	Pengelolaan Belanja Tidak Langsung	Terbitnya SPD, terverifikasinya kelengkapan dokumen SPM Belanja tidak Langsung, terbitnya SP2D, pengujian, register, SKPP, SPT 1721 A2 dan update data pegawai	46 SKPD	134,119,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,119,600	BKAD	Lingkup SKPD

Renstra BKAD 2017-2022

	Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk 45 SKPD	0	0	2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali			
	Daftar gaji bagi 45 SKPD, Bupati, Wakil Bupati, dan DPRD	0	0	14 dok		14 dok		14 dok		14 dok		14 dok		14 dok			
	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk 44 SKPD	0	0	14 dok	137,560,600	14 dok	103,913,000	14 dok	101,664,900	14 dok	110,133,900	14 dok	130,400,700	14 dok	583,673,100	BKAD	Lingkup SKPD
	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) non gaji	0	0	96 dok		97 dok		99 dok		102 dok		103 dok		103 dok			
	Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)	0	0	355 dok		350 dok		350 dok		350 dok		350 dok		350 dok			
Pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)	Terselesaikannya tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi serta kerugian daerah yang bersifat informasi	12 dok	33,545,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 dok	173,841,900	BKAD	Lingkup SKPD
	Laporan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	0	0	2 dok	33,477,400	2 dok	25,288,800	2 dok	22,985,000	2 dok	26,802,700	2 dok	31,742,200	2 dok			
Pengelolaan Kas Umum Daerah	Laporan penerimaan dan pengeluaran Kas Umum Daerah	48 dok		48 dok		48 dok		48 dok		48 dok		48 dok		48 dok			
	Pengesahan dana-dana langsung	0	91,930,100	4 SKPD	84,060,100	4 SKPD	63,498,800	4 SKPD	61,736,100	4 SKPD	66,300,300	4 SKPD	79,703,200	4 SKPD	447,228,600	BKAD	Lingkup SKPD
	Tersahkannya dana-dana langsung yang digunakan SKPD	2 dok		0		0		0		0		0		0			

Renstra BKAD 2017-2022

	Dokumen Anggaran kas	0		2 dok		2 dok		2 dok		2 dok		2 dok		2 dok				
	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Dana Transfer	60 dok		58 dok		58 dok		58 dok		58 dok		58 dok		58 dok				
Pembinaan perbendaharaan	Terbinanya bendahara pengeluaran	45 bendahara	26,499,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,499,200	BKAD	Lingkup SKPD
	Sosialisasi/workshop pengelolaan keuangan daerah	0	0	3 kali		3 kali		3 kali		3 kali		3 kali		3 kali		3 kali		
	Penilaian kinerja perbendaharaan entitas pengelolaan keuangan daerah	0	0	44 SKPD	29,386,000	44 SKPD	22,198,100	44 SKPD	20,931,500	44 SKPD	23,527,100	44 SKPD	27,862,900	44 SKPD		44 SKPD		
Pengelolaan Keuangan PPKD	Tersalurnya belanja keuangan PPKD	12 bulan	22,240,925	12 bulan	32,342,700	12 bulan	24,431,700	12 bulan	24,578,200	12 bulan	25,894,300	12 bulan	30,666,300	12 bulan	160,154,125	160,154,125	BKAD	Lingkup SKPD
Program Peningkatan Penerapan Akuntansi dan Pelaporan	Capaian peningkatan penerapan akuntansi dan pelaporan	100	224,041,925	100	224,043,925	100	169,180,000	100	163,110,000	100	179,370,000	100	212,430,000	100	1,172,175,850	1,172,175,850	BKAD	Lingkup SKPD
Penyusunan Pertanggungjawaban APBD	Tersusunnya Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan tersusunnya Peraturan Bupati tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	2 dok	84,601,625	2 dok	84,601,625	2 dok	70,747,233	2 dok	66,029,723	2 dok	71,378,084	2 dok	84,530,237	2 dok	461,888,527	461,888,527	BKAD	Lingkup SKPD
Penyusunan Laporan Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan APBD triwulanan, semester I dan prognosis.	5 dok	12,438,000	5 dok	20,858,000	23 dok	12,128,035	23 dok	9,052,363	23 dok	12,609,753	23 dok	14,627,496	23 dok	81,713,647	81,713,647	BKAD	Lingkup SKPD

Renstra BKAD 2017-2022

Sinkronisasi data realisasi APBD	Teridentifikasi dan terklasifikasinya data penerimaan dan pengeluaran APBD serta terselenggaranya koordinasi antar SKPD dan SKPKD	45 SKPD	13,812,000	45 SKPD	13,812,000	45 SKPD	10,969,767	45 SKPD	10,016,573	45 SKPD	10,247,709	45 SKPD	10,884,120	45 SKPD	69,742,169	BKAD	Lingkup SKPD
Pengelolaan SIMDA	Tersedianya data akuntansi keuangan daerah yang akurat.	45 SKPD	95,704,300	45 SKPD	104,772,300	45 SKPD	75,334,965	45 SKPD	78,011,341	45 SKPD	85,134,454	45 SKPD	102,388,147	45 SKPD	541,345,507	BKAD	Lingkup SKPD
Penyusunan Laporan Dana Tugas Pembantuan	Tersusunnya laporan dana tugas pembantuan tingkat koordinator UAPPA-W	18 buku	17,486,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,486,000	BKAD	Lingkup SKPD
Program Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Cakupan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	52.72	2,268,770,000	52.89	4,010,551,600	52.94	5,504,170,000	53	5,393,640,000	53.06	6,027,140,000	53.06	6,895,960,000	53.06	30,100,231,600	BKAD	Lingkup SKPD
Rekonsiliasi data piutang PBB Pedesaan dan Perkotaan	Tersedianya Data Piutang PBB P2 Tahun 2013	17 desa	66,308,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,308,800	BKAD	Lingkup SKPD
	Tertagih dan termonitornya wajib pajak daerah	0	0	3 Kcm	65,556,800	3 Kcm	88,310,000	3 Kcm	89,300,000	3 Kcm	108,300,000	3 Kcm	126,300,000	3 KCM	477,766,800		
Perekaman data dan Penetapan Pajak Daerah	Terbitnya SPPT, DHKP, SKPD, SKPKDB, STPD Pajak Daerah Tahun 2017	10 jenis pajak	231,833,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,844,747,000	BKAD	Lingkup SKPD
	Diterbitkannya SPPT, DHKP, SKPD, SKPKDB, STPD Pajak Daerah Tahun 2018 dan Terlegalisasinya SPPT PBB	0	0	10 jenis pajak	231,833,500	10 jenis pajak	312,975,000	10 jenis pajak	316,105,000	10 jenis pajak	350,000,000	10 jenis pajak	402,000,000	10 jenis pajak			
Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Piutang Pajak Daerah Non PBB	2500 WP	683,838,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,504,326,550	BKAD	Lingkup SKPD
	Tertagihnya piutang PBB P2	88 desa		0		0		0		0							

Renstra BKAD 2017-2022

	Tertagih dan termonitornya wajib pajak daerah	0	0	2500 WP	698,088,200	2500 WP	943,500,000	2500 WP	952,900,000	2600 WP	1,048,000,000	2700 WP	1,178,000,000	2700 WP			
Pembaharuan Basis Data PBB P2	Terlaksananya pendataan Obyek dan Subyek Pajak, kode Zona Nilai Tanah (ZNT), Peta Blok PBB P2 Tahun 2017	88 dok	307,406,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999,263,200	BKAD	Lingkup SKPD
	Terlaksananya pendataan Obyek dan Subyek PBB P2 Tahun 2018	0	0	8 dok	116,531,200	8 dok	157,350,000	8 dok	158,930,000	8 dok	194,800,000	8 dok	223,176,000	8 dok			
Pelayanan dan Validasi Data BPHTB	Terlayannya masyarakat dalam mengurus perpajakan termasuk pembetulan, pembatalan, keberatan, mutasi, informasi dan validasi BPHTB	12 bulan	70,031,000	12 bulan	132,511,000	12 bulan	180,000,000	12 bulan	184,304,000	12 bulan	202,734,000	12 bulan	232,062,000	12 bulan	1,001,642,000	BKAD	Lingkup SKPD
Pendataan dan Pendaftaran Obyek dan Subyek Pajak Daerah	Terlaksananya data Obyek dan Subyek Pajak Daerah Tahun 2017	8 jenis pajak	524,661,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524,661,800	BKAD	Lingkup SKPD
	Data Subyek Pajak	0	0	400 wajib pajak	2,381,345,400	400 wajib pajak	3,301,435,000	400 wajib pajak	3,166,295,000	400 wajib pajak	3,534,215,000	400 wajib pajak	4,064,387,000	400 wajib pajak	4,064,387,000	BKAD	Lingkup SKPD
	Data Obyek Pajak	0	0	860 wajib pajak		1200 wajib pajak		1300 wajib pajak		1400 wajib pajak							
Intensifikasi Penerimaan dan Rekonsiliasi Pajak Daerah	Distribusi dokumen PBB P2 tepat waktu di Tahun 2017	88 desa	384,685,550	88 desa	384,685,500	88 desa	520,600,000	88 desa	525,806,000	88 desa	589,091,000	88 desa	670,035,000	88 desa	670,035,000	BKAD	Lingkup SKPD
	Terwujudnya validasi dan akurasi data PPJ dan PBB P2	2 jenis pajak		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan							
	Terlaksananya intensifikasi pajak daerah	10 jenis pajak		10 jenis pajak		10 jenis pajak		10 jenis pajak		10 jenis pajak							

Renstra BKAD 2017-2022

	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Cakupan peningkatan realisasi pendapatan daerah	100	427,719,250	100	461,093,050	100	340,170,000	100	335,460,000	100	362,750,000	100	437,020,400	100	2,364,212,700	BKAD	Lingkup SKPD
	Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah	Tersusunnya database potensi pajak/retribusi	1 dok	133,865,350	1 dok	131,424,050	1 dok	103,639,100	1 dok	103,402,100	1 dok	113,824,000	1 dok	121,070,100	1 dok	707,224,700	BKAD	Lingkup SKPD
Tersusunnya target pendapatan daerah		2 dok	2 dok		2 dok		2 dok		2 dok		2 dok							
Forkom pendapatan se-DIY		0	2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali							
	Evaluasi Pendapatan Daerah	Tersusunnya laporan harian penerimaan pendapatan daerah	12 bulan	34,038,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 bulan	173,005,800	BKAD	Lingkup SKPD
Tersusunnya laporan realisasi bulanan pendapatan daerah		12 bulan	0		0		0		0		0		12 bulan					
Terverifikasinya laporan pendapatan OPD		17 OPD	17 OPD		17 OPD		17 OPD		17 OPD		17 OPD		17 OPD					
Tersusunnya laporan pendapatan OPD Pengelola Pendapatan		0	12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		12 dok					
	Pelayanan dan Pengadministrasian Benda Berharga	Terporforasinya dan tersajinya data karcis retribusi dan terlegalisasinya SPPT PBB	12 bulan	66,757,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 bulan	331,321,100	BKAD	Lingkup SKPD	
Terwujudnya pengendalian karcis pajak dan retribusi yang sah		0	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan					
	Pengembangan Pendapatan Daerah	Sosialisasi pendapatan daerah	1510 orang	193,057,700	16 kali	219,877,400	16 kali	165,098,800	16 kali	161,675,800	16 kali	170,680,000	16 kali	211,435,400	16 kali	1,121,825,100	BKAD	Lingkup SKPD

	Kajian produk hukum tentang pendapatan daerah	0		4 peraturan		4 peraturan		4 peraturan		4 peraturan		4 peraturan		4 peraturan			
Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	Cakupan peningkatan pengelolaan aset daerah	96.67	310,735,725	96.67	732,492,450	96.67	553,110,000	96.67	532,920,000	96.67	576,270,532	96.67	694,260,488	96.67	3,399,789,195	BKAD	Lingkup SKPD
Perencanaan dan Monev Aset Daerah	Tersusunnya dokumen RKBMD, daftar pengadaan, kebijakan pengelolaan aset dan laporan hasil monev pengelolaan aset	3 dok	54,183,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 dok	54,183,000	BKAD	Lingkup SKPD
	Tersusunnya dokumen RKBMD	0	0	1 dok	54,157,000	1 dok	94,102,100	1 dok	94,906,200	1 dok	105,096,941	1 dok	126,550,747	1 dok	379,906,788	BKAD	Lingkup SKPD
	Daftar pengadaan aset	0	0	1 dok		1 dok											
	Kebijakan pengelolaan aset	0	0	1 dok		1 dok											
	Laporan hasil monev pengelolaan aset	0	0	1 dok		1 dok											
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya laporan BMD, SK Bupati Penilaian BMD	2 dok	96,392,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,392,675	BKAD	Lingkup SKPD
	Terbaharukannya SIM Aset dan Persediaan	1 paket		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Laporan semesteran BMD	0	0	2 dok	518,390,000	2 dok	172,208,230	2 dok	162,264,700	2 dok	183,873,179	2dok	223,683,709	2 dok	1,260,419,818	BKAD	Lingkup SKPD
	SK Bupati hasil sensus BMD	0	0	1 dok		1 dok											
	SK Bupati penilaian BMD	0	0	1 dok		1 dok											
Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik	Terlaksananya pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD	4 kali	50,421,225	4 kali	54,898,500		90,217,428		90,096,000		90,796,066		117,005,333		493,434,552	BKAD	Lingkup SKPD

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

RenstraBKAD sangat erat kaitannya dengan dokumen RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022, untuk itu dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen RPJMD sebagai acuan untuk menetapkan indikator kinerja BKAD sehingga dapat tercapai sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara tujuan, sasaran dengan rencana strategis organisasi dan juga untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada RPJMD Tahun 2017-2022, sebagai upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, BKAD menentukan indikator kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022.

Adapun Indikator kinerja BKAD yang telah ditetapkan untuk lima tahun kedepan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat dalam tabel berikut:

Untuk indikator kinerja utama BKAD dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel.7.1
Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2016	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
				Transisi	I	II	III	IV	V	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Cakupan peningkatan pengelolaan keuangan	Prosen	98,10	98,48	99,04	99,22	99,46	99,71	99,97	99,97

	dan aset									
--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Program BKAD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2016	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
				Transisi	I	II	III	IV	V	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Cakupan peningkatan pengelolaan anggaran dan kualitas kebijakan pengelolaan keuangan	Prosen	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Cakupan peningkatan pengelolaan perbendaharaan		97,99	98,48	99,04	99,22	99,46	99,71	99,97	99,97
3	Cakupan peningkatan realisasi pendapatan daerah		102,82	100	100	100	100	100	100	100
4	Cakupan peningkatan penerimaan pajak daerah		52,55	52,72	52,89	52,94	53,00	53,00	53,06	53,06
5	Capaian peningkatan penerapan akuntansi dan pelaporan		100	100	100	100	100	100	100	100
6	Cakupan peningkatan pengelolaan aset dan investasi		96,67	96,67	96,67	96,67	96,67	96,67	96,67	96,67

pemerintah daerah										
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB VIII

PENUTUP

Program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo adalah merupakan program Kabupaten, sedangkan fungsi dibuatnya Renstra BKAD Kabupaten Kulon Progo adalah merupakan penjabaran program RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2022 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

Tujuan penyusunan Renstra BKAD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 adalah membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arahan/strategi pembangunan, tujuan dan sasaran dan strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

Dengan disusunnya renstra BKAD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 diharapkan dapat menjadi pedoman dalam :

1. Penyusunan renja Perangkat Daerah dan program kegiatan prioritas;
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKPA).
3. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).

Renstra BKAD ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Renstra BKAD 2017-2022

1. Untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi BKAD diharapkan masing-masing bidang dapat melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra dengan baik dan benar;
2. Program kegiatan dan indikator yang disusun oleh masing-masing bidang diharapkan selaras dengan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan serta berupaya menjaga konsistensi antara RPJMD, Renstra, Renja, RKA dan DPA BKAD.

Selanjutnya sebagai upaya untuk mewujudkan program kegiatan dan indikator yang telah ditetapkan dalam renstra diperlukan adanya:

1. Melakukan koordinasi dan komunikasi antar pegawai dan antar bidang sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan lebih cepat dan tepat.
2. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap program dan kegiatan pada masing-masing bidang sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Renstra BKAD.

Renstra BKAD 2017-2022

IKU SKPD	METADATA IKU	CARA PERHITUNGAN	TARGET IKU SKPD					
			2017	2018	2019	2020	2021	20221
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cakupan peningkatan pengelolaan keuangan dan aset	((Jumlah realisasi pendapatan/target pendapatanx100%)+(jumlah realisasi APBD/jumlah APBDx100%)+(jumlah SKPD tertib admin istrasi aset/jumlah SKPDx100%))/3		95%	97%	97%	98%	98%	96%
		Jumlah realisasi pendapatan	1.481.626.870.732	1.391.568.150.162	1.416.614.447.610	1.439.268.995.184	1.465.650.937.573	1.492.691.793.564
		Target Pendapatan	1.481.626.870.732	1.391.568.150.162	1.415.614.447.610	1.439.268.995.184	1.465.650.937.573	1.492.691.793.564
		Jumlah realisasi APBD	1.260.097.049.170,80	1.224.284.065.614	1.244.426.227.497	1.263.996.475.454,70	1.286.055.636.385,50	1.308.611.810.062,80
		Jumlah APBD	1.423.745.225.528,92	1.281.370.702.976,03	1.281.370.702.976,03	1.281.370.702.976,03	1.294.313.941.398,93	1.423.745.225.528,92
		Jumlah SKPD tertib administrasi aset	40	40	40	40	40	40
		Jumlah SKPD	42	42	42	42	42	42

Renstra BKAD 2017-2022

PROGRAM	METADATA PROGRAM	CARA PENGHITUNGAN	TARGET PROGRAM					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
11	12	13	14	15	16	17	18	19
Program Peningkatan Pengelolaan Anggaran dan Kualitas Kebijakan Pengelolaan Keuangan	(Jumlah penerbitan dokumen keuangan daerah (Raperda APBD, Perda APBD, Raperda Perubahan APBD, Perda Perubahan APBD, Raperbup APBD, Perbup APBD, Raperbup Perubahan APBD, Perbup Perubahan APBD) tepat waktu/Jumlah dokumen keuangan daerah x 100%) + (Jumlah analisis kebijakan menjadi bahan kebijakan / Jumlah analisis kebijakan yang disusun x 100%) + (Jumlah kebijakan yang dilaksanakan/jumlah kebijakan yang ada tahun n-1 x 100%)/3		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah penerbitan dokumen keuangan daerah (Raperda APBD, Perda APBD, Raperda Perubahan APBD, Perda Perubahan APBD, Raperbup APBD, Perbup APBD, Raperbup Perubahan APBD, Perbup Perubahan APBD) tepat waktu	8	8	8	8	8	8
		Jumlah dokumen keuangan daerah	8	8	8	8	8	8
		Jumlah analisis kebijakan menjadi bahan kebijakan	5	5	5	5	5	5
		Jumlah analisis kebijakan yang disusun	5	5	5	5	5	5

Renstra BKAD 2017-2022

		Jumlah kebijakan yang dilaksanakan	5	5	5	5	5	5
		Jumlah kebijakan yang ada tahun n-1	5	5	5	5	5	5
Program Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan	(Jumlah penerbitan SP2D tepat waktu/Jumlah SPM yang lengkap dan benar X 100%) + (Laporan kas bulanan tepat waktu/laporan kas bulananx 100%) + (Jumlah Realisasi Belanja APBD/Jumlah Belanja APBD x 100%)/3		96,17%	98,51%	99,04%	99,55%	99,79%	97,30%
		Jumlah penerbitan SP2D tepat waktu	2377	2377	2377	2377	2377	2377
		Jumlah SPM yang lengkap dan benar	2377	2377	2377	2377	2377	2377
		Laporan kas bulanan tepat waktu	12	12	12	12	12	12
		laporan kas bulanan	12	12	12	12	12	12
		Jumlah Realisasi Belanja APBD	1.260.097.049.170,80	1.224.284.065.614,00	1.244.426.227.497,00	1.263.996.475.454,70	1.286.055.636.385,50	1.308.611.810.062,80
		Jumlah Belanja APBD	1.459.688.157.586,57	1.281.370.702.976,03	1.281.370.702.976,03	1.281.370.702.976,03	1.294.313.841.389,93	1.423.745.225.528,92
Program Peningkatan Penerapan Akuntansi dan Pelaporan	(Jumlah penerbitan dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah tepat waktu dan sesuai dengan aturan/ ketentuan yang berlaku (Perda dan Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, LRA, Neraca, LO, LPE, LPSAL, LAK, CALK)/Jumlah dokumen keuangan daerah x 100%)		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Jumlah penerbitan dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah tepat waktu dan sesuai dengan aturan/ ketentuan yang berlaku (Perda dan Perbup Pertanggungjawaban	9	9	9	9	9	9

Renstra BKAD 2017-2022

		Pelaksanaan APBD, LRA, Neraca, LO, LPE, LPSAL, LAK, CALK						
		Jumlah dokumen keuangan daerah	9	9	9	9	9	9
Program Peningkatan Pendapatan Daerah	((Jumlah realisasi penerimaan daerah/target penerimaan daerah x 100 %)+ (Jumlah SKPD tertib administrasi pendapatan/Jumlah SKPD pengelola pendapatan x 100%))/2		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Jumlah realisasi penerimaan daerah	1.400.107.832.411,62	1.360.315.628.460,39	1.382.695.808.329,90	1.404.440.528.283,16	1.428.950.707.094,75	1.454.013.122.292,23
		Target penerimaan daerah	1.400.107.832.411,52	1.360.315.628.460,39	1.382.695.808.329,90	1.404.440.528.283,16	1.428.950.707.094,75	1.454.013.122.292,23
		Jumlah SKPD tertib administrasi pendapatan	17	17	17	17	17	17
		Jumlah SKPD pengelola pendapatan	17	17	17	17	17	17
Program Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	((Jumlah realisasi penerimaan pajak/target penerimaan pajak x 100 %) + Jumlah realisasi pembayaran piutang pajak/jumlah piutang pajak x100%))/2		52,72%	52,89%	52,94%	53,00%	53,06%	53,06%
		Jumlah realisasi penerimaan pajak	81.519.038.320,79	31.252.521.701,16	32.918.639.280,53	34.828.466.900,66	36.700.230.478,31	38.678.671.271,42
		Target penerimaan pajak	81.519.038.320,79	31.252.521.701,16	32.918.639.280,53	34.828.466.900,66	36.700.230.478,31	38.678.671.271,42
		Jumlah realisasi pembayaran piutang pajak	500.000.000	520.000.000,00	530.000.000	540.000.000	550.000.000	550.000.000
		Jumlah piutang pajak	9.200.000.000	9.000.000.0000	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000

Renstra BKAD 2017-2022

Program Peningkatan Pengelolaan Asset dan Investasi Pemerintah Daerah	(Jumlah SKPD tertib administrasi asset tetap dan tak berwujud / Jumlah SKPD x 100%)+ (Jumlah SKPD tertib administrasi persediaan / Jumlah SKPD x 100%)+ (Jumlah penghapusan asset/jumlah permohonan penghapusan asset x 100%) + (Jumlah optimalisasi asset/Jumlah asset yang belum optimal x 100%) + (Jumlah realisasi investasi/Jumlah rencana investasi x 100%)/5		94,76%	94,76%	94,76%	94,76%	94,76%	94,76%
		Jumlah SKPD tertib administrasi asset tetap dan tak berwujud	40,00	40	40	40	40	40
		Jumlah SKPD	42,00	42	42	42	42	42
		Jumlah SKPD tertib administrasi persediaan	40,00	40	40	40	40	40
		Jumlah SKPD	42,00	42	42	42	42	42
		Jumlah penghapusan asset	32	32	32	32	32	32
		jumlah permohonan penghapusan asset	32	32	32	32	32	32
		Jumlah optimalisasi asset	10,00	10	10	10	10	10
		Jumlah asset yang belum optimal	12,00	12	12	12	12	12
		Jumlah realisasi investasi	5	5	5	5	5	5
		Jumlah rencana investasi	5	5	5	5	5	5

LAMPIRAN

Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2016	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
				Transisi	I	II	III	IV	V	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Cakupan peningkatan pengelolaan keuangan dan aset	Prosen	98,10	98,48	99,04	99,22	99,46	99,71	99,97	99,97

Indikator Kinerja Program BKAD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2016	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
				Transisi	I	II	III	IV	V	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Cakupan peningkatan pengelolaan anggaran dan kualitas kebijakan pengelolaan keuangan	Prosen	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Cakupan peningkatan pengelolaan perbendaharaan		97,99	98,48	99,04	99,22	99,46	99,71	99,97	99,97
3	Cakupan peningkatan realisasi		100	100	100	100	100	100	100	100

Renstra BKAD 2017-2022

	pendapatan daerah									
4	Cakupan peningkatan penerimaan pajak daerah		102,82	100	100	100	100	100	100	100
5	Capaian peningkatan penerapan akuntansi dan pelaporan		52,55	52,72	52,89	52,94	53,00	53,00	53,06	53,06
6	Cakupan peningkatan pengelolaan aset dan investasi pemerintah daerah		96,67	96,67	96,67	96,67	96,67	96,67	96,67	96,67